**PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN DANA INSENTIF
GUNA Mendukung PEMBANGUNAN
EKONOMI KREATIF DAERAH**

Anita Kamilah
Universitas Suryakencana
E-mail: anita.kamilah@yahoo.co.id

Masuk: Maret 2019	Penerimaan: April 2019	Publikasi: Juni 2019
-------------------	------------------------	----------------------

ABSTRAK

Dengan diberlakukannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada awal tahun 2016, maka pasar global antar wilayah ASEAN semakin terbuka dan persaingan antar negara sangat ketat dalam memasarkan produk atau jasa ekonomi kreatifnya. Kondisi tersebut, memacu bangsa Indonesia termasuk Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan dan memanfaatkan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kreatif guna meningkatkan perekonomian daerah. Namun pengembangan ekonomi kreatif tersebut terhambat dalam mendapatkan dukungan pendanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, apa yang menjadi latar belakang pemerintah Kabupaten Cianjur mengembangkan kebijakan ekonomi kreatif dan bagaimanakah dukungan pemerintah dalam menyediakan akses permodalan dalam mengembangkan ekonomi kreatif daerah. Guna mengkaji permasalahan tersebut, metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan mempelajari asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Kata Kunci: Dana Insentif; Era Globalisasi; Ekonomi Kreatif.

ABSTRACT

With the enactment of the ASEAN Free Trade Area (AFTA) and the ASEAN Economic Community (AEC) in early 2016, global markets between ASEAN regions are increasingly open and competition between countries is very tight in marketing their creative economy products or services. These conditions, spurred the Indonesian people including the Cianjur Regency Government to increase and take advantage of business opportunities through the development of a relative economy in order to increase regional economy. But the development of the creative economy is hampered in getting funding support. In connection with this, what is the background of the Cianjur regency government to develop creative economic policies and how government support in providing access to capital in developing the regional creative economy. In order to examine this problem, the method used is juridical normative approach, by

studying the principles of law, especially positive legal rules that have a relationship with the problem that is the object of research.

Keywords: *Creative Economy; Era of Globalization; Incentive Funds.*

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri kreatif di Indonesia saat era globalisasi ini semakin meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya bahkan menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Pada saat perusahaan-perusahaan besar mengalami krisis moneter, industri kecil tersebut memiliki kemampuan untuk bertahan dalam mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi. Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, bahwa pada tahun 2015 industri kecil telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB) yaitu sebesar Rp. 852 triliun atau 7,38 persen, dan pada tahun 2018 diperkirakan akan melampaui Rp1.000 triliun, dan sesuai Rencana Strategis Bekraf 2015-2019 penyerapan tenaga kerja mencapai mencapai 18,1 juta orang.¹

Kabupaten Cianjur dengan dukungan potensi karakteristik demografis, kekayaan alam serta kekayaan kearifan lokal, menjadi perhatian Pemerintah daerah untuk mengembangkan ekonomi kreatif, sebagai sebuah konsep di era-ekonomi baru yang mengedepankan informasi, kreativitas, ide, dan kolaborasi *knowlege* dari potensi Sumber Daya Manusia yang diramu dengan nilai-nilai iptek sebagai modal dasar untuk menghadapi persaingan ekonomi, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dikembangkannya konsep pengembangan ekonomi kreatif, diantaranya didasarkan pada alasan-alasan bahwa industri kreatif terbukti telah memainkan peran yang signifikan bagi perekonomian nasional dengan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja, menciptakan identitas daerah,

¹ Bekraf: Penyerapan Tenaga Kerja Kreatif pada 2019 Akan Lampau Target",

<https://katadata.co.id/berita/2018/12/13/bekraf-penyerapan-tenaga-kerja-kreatif-pada-2019-lampau-target>.

mendorong kreativitas dan inovasi para pelaku ekonomi kreatif, memberi dampak ekonomi positif pada peningkatan keuangan daerah, menggalakan prakarsa dan peran masyarakat, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah, meningkatkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antara daerah, serta mempercepat pertumbuhan daerah.²

Guna mengembangkan ekonomi kreatif, sejak tahun 2016 dikembangkan Dana Ekonomi Kreatif (Dekraf) sebagai salah satu pola atau cara untuk membantu pelaku usaha ekonomi kreatif dalam bentuk penambahan modal kerja dan/atau investasi aktiva tetap guna meningkatkan kapasitas usaha dan/atau produksinya, selain itu Dana Ekonomi Kreatif sebagai payung program terkait permodalan dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dengan tujuan agar semakin banyak lembaga

keuangan yang mempunyai portofolio di ekonomi kreatif. Dilatarbelakangi persoalan tersebut, identifikasi masalah tentang: (1) Apa yang menjadi latarbelakang pemerintah Kabupaten Cianjur mengembangkan kebijakan ekonomi kreatif, dan (2) Bagaimanakah dukungan pemerintah dalam menyediakan akses permodalan dalam mengembangkan ekonomi kreatif daerah.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yuridis normatif, melalui pendalaman dan pengkajian berbagai asas dari kaidah hukum yang berlaku yang bersumber dari berbagai kepustakaan seperti perundang-undangan khususnya peran pemerintah dalam memberikan dana insentif guna mendukung pembangunan ekonomi kreatif daerah.³ Spesifikasi penelitian merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu

² Sumodiningrat, 1998, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 24, dan Andri Irawan, 2015, *Ekonomi Kreatif Sebagai Suatu Solusi Mensejahterakan Masyarakat Dalam Meningkatkan Tingkat Perekonomian*, Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis (SNEB), Proceedings, hlm. 4.

³ Sumodiningrat, 1998, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 24, dan Andri Irawan, 2015, *Ekonomi Kreatif Sebagai Suatu Solusi Mensejahterakan Masyarakat Dalam Meningkatkan Tingkat Perekonomian*, Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis (SNEB), Proceedings, hlm. 4.

memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis peran pemerintah dalam memberikan dana insentif guna mendukung pembangunan ekonomi kreatif daerah. Selanjutnya analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis tanpa menggunakan angka-angka.⁴

III. PEMBAHASAN

a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif.

Secara geografis, Kabupaten Cianjur terletak pada koordinat 106° 42' - 107° 05' Bujur Timur dan 6° 21' - 7° 05' Lintang Selatan, dengan ketinggian 7-2.962 mdpl dan memiliki kemiringan 0-40%. Wilayah Kabupaten Cianjur memiliki luas wilayah 361.434,98 ha yang tersebar kedalam 32 kecamatan dengan batas-batasnya: (1) Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta merupakan perbatasan sebelah utara; (2) Sebelah timur berbatahan dengan Kabupaten

Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut; (3) Samudra Hindia merupakan batas di sebelah selatan; dan (4) sebelah barat berbatasan dengan daerah terdekat dengan Kabupaten Cianjur yaitu Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor.⁵ Kabupaten Cianjur, memiliki pertumbuhan perekonomian wilayah di bidang agribisnis, kerajinan rumah tangga, industri manufaktur, perdagangan dan jasa, serta pariwisata yang menawarkan objek wisata alam, wisata sejarah, serta wisata seni dan budaya, menjadi potensi besar dalam mengembangkan ekonomi kreatif.⁶

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 250

⁵ Anita Kamilah, 2017, *Investasi Pembangunan Pariwisata Melalui Model Build Operate And Transfer/BOT Dalam Menghadapi Keterbatasan APBD Kabupaten Cianjur*, *Journal Of Empowerment* Vol. 1, No. 2, hlm. 72.

⁶ Anita Kamilah, *Investasi Pembangunan Pariwisata ...*, *Ibid.*, hlm. 72.

pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan kekhasan daerah di era ekonomi baru melalui pengembangan ekonomi kreatif yang mengedepankan informasi, kreativitas serta ide kolaborasi *knowlege* dari Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan amanat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, kemudian Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, yang diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, maka Pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki kebijakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif daerah.

John Howkins dan Kementerian Pariwisata, menyebutkan ekonomi kreatif sebagai ekonomi tumpuan masa depan dimana di dalamnya terdapat penciptaan nilai tambah yang mendapatkan dukungan kreativitas dari SDM yang kreatif, budaya, warisan

budaya dan lingkungan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷ Ekonomi kreatif sering disebut juga industri kreatif karena berbagai hal yang memerlukan kreativitas, keterampilan, dan bakat yang memiliki peran penting dalam menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan dengan dukungan intelektual yang di dalamnya mencakup arsitektur, iklan, kerajinan, pasar seni dan barang antik, film dan video, percetakan, musik, seni pertunjukan, *software*, televisi dan radio serta video dan game komputer, serta desain dan fashion.⁸

Pengembangan ekonomi kreatif didasarkan pada fakta empiris, bahwa awal abad ke-21 kehidupan ekonomi umat manusia telah memasuki orbit ekonomi kreatif (*creativity based economy*) yang menuntut keunggulan

⁷ John Howkins, 2001, *The Creative Economy*. UK, The Penguin Press. dalam Ginanjar Kartasasmita, 1996, *Pembangunan untuk rakyat*. Pustaka Cidesindo, Jakarta, yang diadopsi oleh Lak Lak Nazhat El Hasanah, *Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 270.

⁸ Lak Lak Nazhat El Hasanah, *Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif ...*, *Ibid.*, hlm. 270.

kreasi dan inovasi. Beragam kekayaan budaya nasional serta tingginya kreativitas masyarakat Indonesia, menjadi kekuatan baru ekonomi Indonesia melalui pengembangan ekonomi kreatif yang diharapkan menjawab tantangan dari berbagai permasalahan ekonomi yang ada untuk meningkatkan daya saing produk ekspor yang saat ini masih didominasi oleh produk ekspor berbasis sumberdaya menjadi produk ekspor yang berbasis daya nalar, kreativitas, dan inovasi. Sehubungan dengan hal tersebut, bersinergi dengan program pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Cianjur mengembangkan kebijakan ekonomi kreatif.⁹

Ekonomi Kreatif menjadi *soft power* yang dimiliki bangsa Indonesia termasuk di dalamnya Pemerintah Kabupaten Cianjur yang memiliki posisi strategis dengan dukungan dari berbagai aspek, baik potensi SDM, potensi budaya, serta pasar domestik yang besar. Dari sisi karakteristik

demografis, ekonomi kreatif memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan di Kabupaten Cianjur melalui dukungan jumlah penduduk dengan angkatan kerja yang tinggi, sehingga dapat menjadi salah satu potensi dalam memperkuat industri kreatif lokal. Ketersediaan sumber daya kreatif (orang kreatif) yang bersumber dari jumlah penduduk yang tinggi akan menjadi modal sosial yang besar untuk menjadi motor penggerak perekonomian daerah yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta mencegah pemusatan penguasaan ekonomi oleh satu kelompok atau perseorangan yang akan merugikan masyarakat; memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang berusaha, mewujudkan pemerataan pembangunan perekonomian berkeadilan, sehingga harus diberdayakan secara berkelanjutan agar mampu bersaing pada tingkat global.

Namun demikian, fakta empirisnya masih ada kendala yang dihadapi daerah yaitu: (a) Masih rendahnya kualitas tenaga kerja yang

⁹ Moelyono, Mauled, 2010, *Menggerakkan Ekonomi Kreatif Antara Tuntutan dan Kebutuhan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 261.

memiliki mindset kreatif dan inovatif; (b) Rendahnya investor untuk menanamkan modalnya, serta terbatasnya akses pembiayaan perbankan karena adanya anggapan prospek bisnis ekonomi kreatif masih rendah dan dinilai masih berisiko tinggi; (c) Sulitnya akses pasar produk kreatif karena belum terbangunnya rantai distribusi produk kreatif Indonesia ke pasar dunia; (d) Terbatasnya pemanfaatan serta produksi bahan baku untuk produk kreatif; (f) Belum memadainya ketersediaan infrastruktur dan teknologi sebagai persyaratan utama daya saing industri kreatif Indonesia; dan (g) Masih lemahnya partisipasi dan sinergitas para pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan ekonomi kreatif.¹⁰

b. Dukungan Pemerintah Dalam Menyediakan Akses Permodalan Dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif Daerah.

Kondisi sumber daya alam setiap tahunnya semakin terdegradasi, maka

Ekonomi Kreatif (Ekraf) diharapkan mampu menjadi kekuatan baru ekonomi nasional maupun daerah di masa mendatang, walaupun pengembangannya belum sepenuhnya mendapat dukungan pendanaan perbankan. Guna mewujudkan ekonomi kreatif menjadi kekuatan baru ekonomi Indonesia, pemerintah menyusun Rencana Strategis (Renstra) pengembangan ekonomi kreatif untuk periode 2015-2019 sebagai arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dimana salah satu programnya yaitu memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif nasional kepada sumber-sumber pendanaan dan menumbuhkembangkan alternatif sumber-sumber pendanaan baru.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai negara yang didasarkan atas hukum, yang menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*) itu berasal dari peraturan perundang-undangan,¹¹ maka Direktorat Akses Non Perbankan

¹⁰ Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, *Renstra Badan Ekonomi Kreatif Indonesia 2015-2019*, hlm. 6-7.

¹¹ Ridwan HR., 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT RajaGrafindo, hlm. 103.

Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif, menyusun: “Petunjuk Teknis Bantuan Insentif Penambahan Modal Kerja Dan/Atau Investasi Aktiva Tetap Untuk Meningkatkan Kapasitas Usaha/Produksi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif”, yang berpijak pada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif.
3. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

5. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.¹²

Bantuan insentif merupakan jenis bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) dalam bentuk dana uang untuk penambahan modal kerja dan/atau investasi aktiva tetap dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha/produksi pelaku usaha ekonomi kreatif. Memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku mengenai Bantuan Pemerintah, disusun Petunjuk Teknis bantuan insentif penambahan modal kerja bagi pelaku usaha ekonomi

¹² Fadjar Hutomo, 2019, *Petunjuk Teknis Bantuan Insentif Penambahan Modal Kerja Dan/Atau Investasi Aktiva Tetap Untuk Meningkatkan Kapasitas Usaha/Produksi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif*, Direktorat Akses Non Perbankan Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif, hlm. 6-7.

kreatif Indonesia, yang di dalamnya menjelaskan ruang lingkup kegiatan bantuan modal kerja, kriteria, pola transfer bantuan, tatacara pencairan, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persyaratan Penerima Bantuan.

Pelaku ekonomi yang dapat mengikuti proses seleksi Bantuan Insentif Pemerintah dibatasi pada empat subsektor yakni aplikasi digital dan pengembang Gim (Game), kriya, fashion dan kuliner, dan direkomendasikan untuk pelaku usaha yang telah mengikuti program pembinaan yang diadakan Badan Ekonomi Kreatif. Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi penerima bantuan yaitu :

- a) Penanggung jawab Badan Usaha adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- b) Memiliki kecakapan hukum.
- c) Berbadan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), dan Koperasi, dengan

kepemilikan saham dan entitasnya 100 persen dimiliki Warga Negara Indonesia.

- d) Mendaftar di web BISMA, yaitu www.bisma.bekraf.go.id (dibuktikan dengan melampirkan bukti *screenshot* pendaftaran pada proposal).
- e) Untuk subsektor aplikasi digital & pengembang Gim (Game), kriya, fashion, kuliner melampirkan portofolio berupa link, foto dan/atau video untuk karya atau produk yang pernah dihasilkan, dan untuk subsektor aplikasi digital secara khusus harus terdaftar pada platform GSI (*Go StartUp* Indonesia, dan untuk subsektor kuliner melampirkan ijin usaha dan/atau ijin edar minimal PIRT.
- f) Memiliki nama dan tempat kedudukan usaha yang tetap,

- ditunjukkan dengan surat keterangan domisili dari Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan surat izin usaha sesuai ketentuan.
- g) Memiliki Rekening atas nama badan usaha di Bank Pemerintah.
- h) Melampirkan fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Badan Usaha serta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak 1 tahun terakhir.
- i) Mengajukan proposal penambahan modal kerja dan/atau investasi aktiva; dan
- j) Dalam tahun berjalan, tidak sedang menerima bantuan sejenis dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.¹³
2. Bentuk dan Besar Jumlah Bantuan.
- Bantuan yang diberikan Pemerintah dalam bentuk transfer dana, yang penyalurannya dilakukan pada penerima bantuan dalam satu tahap dengan pembayaran langsung (LS) setelah ditetapkan oleh PPK dan waktu pelaksanaan kegiatannya telah disetujui oleh kurator, dengan besar bantuan maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Tatacara Pengajuan Bantuan Pendanaan Ekonomi Kreatif.
- a. Pengajuan Proposal.
- Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, secara elektronik Proposal atau Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dikirim kepada Tim Bantuan Insentif Pemerintah Deputi Akses Permodalan Bekraf, dengan melampirkan dokumen dan data pendukung lainnya yaitu :
- 1) Studi kelayakan bisnis, potensi pasar, tingkat persaingan dan besarnya kebutuhan modal untuk peningkatan skala atau kapasitas produksi.

¹³ Fadjar Hutomo, *Petunjuk Teknis Bantuan Insentif Penambahan Modal Kerja*, *Ibid.*, hlm. 7-8.

2) Model bisnis dan riwayat pengalaman pengembangan bisnisnya. 3) Riwayat hidup pendiri usaha/founder dan atau co-founder. 4) Riwayat kemitraan dengan lembaga pendamping atau pihak lain. 5) Status kesiapan bisnis yaitu tahap awal (prototyping), tahap pengembangan (sudah mendapat keuntungan atau nilai valuasi tertentu), atau dalam tahap pematangan (sudah membutuhkan penambahan modal yang lebih besar), tahap leading (dari keunggulan dan positioning produk dan sudah membutuhkan penambahan modal yang jauh lebih besar), juga adanya kelengkapan tim	organisasi usaha dan perhitungan rencana kedepannya. 6) Perhitungan perencanaan keuangan dan proyeksi pendapatan, serta kinerja keuangan dan profitabilitas; termasuk Laporan Neraca Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Arus Kas jika ada. 7) Pengajuan Rencana Anggaran Belanja (RAB) atau penggunaan dana Bantuan Insentif. 8) Rencana keberlanjutan penggunaan bantuan pemerintah dalam satu tahun setelah menerima anggaran dan setelahnya.¹⁴ b. Seleksi Administrasi. Tim Administrasi Bantuan Insentif Pemerintah melakukan seleksi administrasi untuk melakukan pengecekan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 17-18.

kesesuaian tujuan permohonan, kelengkapan dan kebenaran isi proposal. c. Mekanisme Seleksi Substansi : 1) Seleksi Substansi Proposal. Tim Kurasi menilai substansi proposal dan kinerja calon penerima bantuan, untuk melihat kesesuaian dan kelayakan antara calon penerima bantuan dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. 2) Seleksi Presentasi Substansi dan Wawancara. Seleksi lanjutan dilakukan Tim Kurasi untuk menilai substansi proposal dari kinerja calon penerima bantuan dalam bentuk presentasi dan wawancara, dengan tujuan untuk melihat apakah calon penerima bantuan dapat menjelaskan substansi	proposal dan kinerjanya beserta rencana penggunaan dana bantuan dalam satu tahun kedepan atau lebih kepada Tim Kurasi. 3) Verifikasi Lapangan. Adalah validasi data dan informasi yang tercantum dalam proposal dan presentasi. 4) Verifikasi Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pengusul. Merupakan justifikasi kembali dan revisi yang diperlukan terkait anggaran yang dibutuhkan proposal, sesuai dengan hasil seleksi substansi 4. Penetapan Penerima Bantuan. Ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Akses Permodalan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 5. Pengikatan Komitmen PKS. Penerima bantuan melakukan Pengikatan Komitmen dalam Perjanjian Kerja Sama, yang di dalamnya memuat

klausul-klausul antara lain : 1) Hak kewajiban para pihak; 2) Jumlah bantuan; 3) Jangka waktu bantuan; 4) Penggunaan bantuan sesuai kesepakatan; 5) Kesanggupan menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara; dan 6) Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai.

6. Pencairan Bantuan dan Penggunaan Dana Bantuan.

Bantuan yang diberikan Pemerintah dalam bentuk transfer dana, yang penyalurannya dilakukan dalam satu tahap dengan pembayaran langsung (LS) setelah ditetapkan oleh PPK dan waktu pelaksanaan kegiatannya telah disetujui oleh kurator, dengan besar bantuan maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Guna mewujudkan pengembangan ekonomi kreatif, dana bantuan hanya dapat digunakan untuk hal-hal yang berdampak signifikan bagi pertumbuhan usaha, yaitu untuk: (a) Sewa ruang kerja untuk pengembangan usaha; (b) Sewa/beli perangkat lunak

(software) dan/atau perangkat keras (hardware); (c) Pembelian bahan baku/bahan penolong; (d) Pembelian peralatan dan/atau mesin produksi penunjangnya; dan (e) Pembayaran jasa kepada pihak ketiga (perorangan atau badan usaha) yang terkait dengan pengembangan usaha.¹⁵

7. Laporan dan Pertanggungjawaban.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima, pelaku ekonomi kreatif memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan secara tertulis, kepada Badan Ekonomi Kreatif melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK Deputi Akses Permodalan, dan Deputi Akses Permodalan, yang terbagi ke dalam dua bentuk laporan yaitu :

a) Laporan Awal.

Penerima bantuan memberikan pelaporan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pencairan, meliputi pelaporan penyerapan anggaran, konsistensi antara

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

perencanaan dan implementasi, serta pencapaian target keluaran.

b) Laporan Akhir.

Pelaporan akhir adalah pelaporan yang dilakukan penerima bantuan insentif selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah dana digunakan 100%.

Memastikan pelaku usaha ekonomi kreatif penerima bantuan insentif menggunakan dana sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bantuan, dilakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi oleh Tim MPE, yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Deputi Akses Permodalan, Penanggungjawab Kegiatan, Tim Administrasi dan PPK. Tolak ukur yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu : (1) setelah bantuan dicairkan, maka tolak ukur yang digunakan adalah penyerapan anggaran, konsistensi kesesuaian antara perencanaan dan implementasi, pencapaian target keluaran; dan (2) Setelah Penggunaan

Dana bantuan 100%, tolak ukur yang digunakannya antara lain dengan membandingkan kondisi sebelum dan setelah menerima Bantuan berupa: peningkatan produksi, peningkatan penjualan/omset, perkembangan tenaga kerja, jumlah pengguna dan ekspansi pengguna, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, liputan media, pencapaian target kinerja dan perkembangan usaha, peningkatan citra merek (*brand image*) dan penambahan investasi dari pihak lainnya.¹⁶

Berdasarkan hasil monitoring, pengendalian, dan evaluasi tersebut, Kurator sebagai kumpulan ahli yang melakukan penilaian secara teknis proposal bantuan yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Ekonomi Kreatif, menemukan ketidaksesuaian pemanfaatan bantuan dapat memberikan sanksi berupa: (a) Teguran tertulis; (b) Pemberhentian dana Bantuan; (c) Sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku; (d) Dilakukan *black list*.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

Kemudian, jika terjadi penyimpangan penggunaan dana bantuan, maka akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab penerima bantuan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan.

- a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif.

Pengembangan ekonomi kreatif didasarkan pada fakta empiris, bahwa awal abad ke-21 kehidupan ekonomi umat manusia telah memasuki orbit ekonomi kreatif (*creativity based economy*) yang menuntut keunggulan kreasi dan inovasi. Ekonomi Kreatif merupakan sebuah *soft power* yang dimiliki bangsa Indonesia termasuk di dalamnya Pemerintah Kabupaten Cianjur yang sangat strategis dari berbagai aspek, baik sumberdaya manusia, keragaman dan keunikan budaya, serta pasar domestik yang besar. Dari sisi karakteristik demografis, Kabupaten Cianjur sangat potensial

untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Jumlah penduduk dengan angkatan kerja yang tinggi dapat diarahkan untuk memperkuat industri kreatif lokal. Ketersediaan sumber daya kreatif (orang kreatif) yang bersumber dari jumlah penduduk yang tinggi akan menjadi modal sosial yang besar untuk menggerakkan perekonomian daerah yang mandiri, berdaya saing, dan mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau sekelompok orang, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan. Oleh karena itu, harus diberdayakan secara berkelanjutan agar mampu bersaing pada tingkat global.

- b. Dukungan Pemerintah Dalam Menyediakan Akses Permodalan Dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif Daerah.

Guna mewujudkan ekonomi kreatif menjadi kekuatan baru ekonomi Indonesia, pemerintah memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif nasional kepada sumber-sumber pendanaan dan

menumbuhkembangkan alternatif sumber-sumber pendanaan baru, salah satu wujudnya pemerintah memberikan Bantuan Insentif Penambahan Modal Kerja Dan/Atau Investasi Aktiva Tetap Untuk Meningkatkan Kapasitas Usaha/Produksi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif, yang dilengkapi dengan petunjuk teknisnya guna memudahkan pelaku usaha ekonomi kreatif memanfaatkannya dimana didalamnya memuat mengenai ruang lingkup kegiatan bantuan modal kerja, kriteria, pola transfer bantuan, tatacara pencairan, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya.

2. Saran.

Guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kreatif, di bawah ini terdapat beberapa saran, yaitu :

- a. Salah satu tantangan yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif adanya regulasi yang menghambat dalam mengembangkan usahanya, maka guna memberikan kepedulian terhadap keberadaannya

diharapkan adanya peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti melalui peraturan daerah yang menaungi (*umbrella act*) pengaturan mengenai ekonomi kreatif, serta perlu dilakukannya koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif.

- b. Mengingat kualitas SDM ekonomi kreatif daerah masih jauh tertinggal dari negara-negara yang ekonomi kreatifnya sudah berkembang, maka perlu disusun langkah kerja sama dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang terkait dalam hal pengembangan ekonomi kreatif.
- c. Minimnya minat dan pemahaman ekonomi keuangan baik perbankan maupun non-bank, membatasi ruang pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan, Lembaga Keuangan Mikro, serta perlunya

diberikannya insentif bagi pemodal/investor yang akan dan telah berinvestasi di sektor ekonomi kreatif.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif.

Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, Renstra Badan Ekonomi Kreatif Indonesia 2015-2019.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Ginanjari Kartasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*. Pustaka. Jakarta, Cidesindo.

John Howkins, 2001, *The Creative Economy*. UK, The Penguin Press.

Moelyono, Mauled, 2010, *Menggerakkan Ekonomi Kreatif Antara Tuntutan dan Kebutuhan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT RajaGrafindo.

Sumodiningrat, 1998, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

C. Jurnal, Skripsi, Tesis, Internet

Andri Irawan, 2015, *Ekonomi Kreatif Sebagai Suatu Solusi Mensejahterakan Masyarakat Dalam Meningkatkan Tingkat*

Perekonomian, Seminar Nasional
Ekonomi dan Bisnis (SNEB),
Proceedings.

Anita Kamilah, 2017, Investasi
Pembangunan Pariwisata Melalui
Model Build Operate And
Transfer/BOT Dalam Menghadapi
Keterbatasan APBD Kabupaten
Cianjur, *Journal Of Empowerment*
Vol. 1, No. 2.

Bekraf: *Penyerapan Tenaga Kerja
Kreatif pada 2019 Akan
Lampaui Target*",
<https://katadata.co.id/berita/2018/12/13/bekraf-penyerapan-tenaga-kerja-kreatif-pada-2019-lampaui-target>.

Fadjar Hutomo, 2019, *Petunjuk Teknis
Bantuan Insentif Penambahan
Modal Kerja Dan/Atau Investasi
Aktiva Tetap Untuk
Meningkatkan Kapasitas
Usaha/Produksi Pelaku Usaha
Ekonomi Kreatif*, Direktorat Akses
Non Perbankan Deputi Akses
Permodalan Badan Ekonomi
Kreatif.

Lak Lak Nazhat El Hasanah, 2015,
Pengembangan Wirausaha Muda
Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya
di Daerah Istimewa Yogyakarta,
Jurnal Studi Pemuda, Vol. 4, No.
2.